



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

PIMINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah provinsi yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Gubernur perlu ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi tentang Program Peraturan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otomoni Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undanag Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tetib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2010 Nomor 45);

Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Badan Pembentukan Daerah Dewan Perwakilan Papua Barat pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Masa Sidang III hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tahun 2025.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025, melalui

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diitetapkan.

KEEMPAT

:

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI

PAPUA BARAT
KETUA,



ORGENES WONGGOR

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025.
TANGGAL 12 DESEMBER 2024

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	JENIS PERATURAN	INISIATIF	STATUS	KET.
1.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.	DPRPB	Usulan Baru (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
2.	Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi Pengusaha Orang Asli Papua.	DPRPB	Usulan Baru (Prioritas)	Naskah Akademik
3.	Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal	DPRPB - Fraksi Golkar	Usulan Baru (Prioritas)	Naskah Akademik
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT Papua Doberai Mandiri	Pemerintah Daerah: Biro Perekonomian	Usulan Baru/ Revisi (Prioritas)	Keterangan/ Penjelasan
5.	Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	Usulan Baru Prioritas	NA/Keterangan Penjelasan
6.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rancangan Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi.	Pemerintah Daerah: Dinas Kebudayaan Pariwisata	Usulan Baru/revisi (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
7.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kawasan Tanpa Rokok Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Dinas Kesehatan	Usulan Baru Prioritas	NA/Keterangan Penjelasan

8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Usulan Baru Prioritas	NA/Keterangan Penjelasan
9.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Penyelengaraan Penanaman Modal Daerah	Pemerintah Daerah: Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Usulan Baru (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
10.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Usulan Baru (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
10	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pemerintah Daerah (BPPKAD)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024 (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
11.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Peta Jalan Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (BRIDA)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024 (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
12.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Protokol Investasi di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (BRIDA)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024 (Prioritas)	NA/Keterangan Penjelasan
13	Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Peradilan Adat.	DPRPB	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024) (Prioritas)	Naskah Akademik
14.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Pemerintah Daerah: Dinas Kesehatan	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
15.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penertiban Kendaraan Plat Luar Daerah di Provinsi Papua Barat	Pemerintah Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
16.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penertiban Aktivitas sosial ekonomi pada ruas jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.	Pemerintah Daerah: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan

17.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tenaga Kerja Konstruksi Tidak Bersertifikat Keahlian di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
18.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penataan Dan Penerbitan Aktifitas Sosial Ekonomi Pada Ruas Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
19.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pramuwisata	Pemerintah Daerah: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
20.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolan Sektor Pariwisata di Provinsi Papua Barat	Pemerintah Daerah: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
21.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Disabilitas.	Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
22.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Upaya Khusus Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nelayan dan Peternak di Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Dinas Tanaman Pangan Hultikultura Dan Pertanian)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
23.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan Dan Perikanan)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
24.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Informasi Publik Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (DISKOMINFO)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
25.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (DISKOMINFO)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
26.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
27.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Ketiga Atas Perdasi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan

	Daerah Provinsi Papua Barat.			
28.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Sistem Tambatan Kapal Wisata di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (BRIDA)	Usulan Baru	NA/Keterangan Penjelasan
29.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penataan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (BRIDA)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
30.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Mineral dan Batu Bara di Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
31.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
32.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
33.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang SOP Hibah/Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
34.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
35.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dan Perhitungannya Serta Pertanggungjawaban dan Pengawasannya.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
36.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kewenangan Provinsi Papua Mencakup Kewenangan Dalam Seluruh Bidang Pemerintahan dan Kewenangan Khusus	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan

37.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Lambang Daerah	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
38.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
39.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Bidang Sosial	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
40.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
41.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Barat.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan
42.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembangunan Kependudukan.	Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus)	Operan (Carry Over) Propemperda Tahun 2024	NA/Keterangan Penjelasan

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025**

NO	NAMA PERDA	BIDANG KERJA	INISIATIF	STATUS	KET.
1	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024	BPPKAD	Pemerintah Daerah	Baru	Prioritas
2	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Perubahan APBD Tahun 2025	BPPKAD	Pemerintah Daerah	Baru	Prioritas -
3	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	BPPKAD	Pemerintah Daerah	Baru	- Prioritas
4	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Rencana Pembangunan Jangka	BAPPEDA	Pemerintah Daerah	Baru	Prioritas

	Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025- 2030				
--	--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI



PAPUA BARAT
KETUA,

ORGENES WONGGOR